**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**INSPEKTORAT PROVINSI**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Informasi Umum**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik *(good government)* dan gunamencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka di setiap institusi pemerintah dibentuk lembaga pengawasan internal yang secara khusus melaksanakan fungsi pengawasan. Lembaga pengawasan internal pemerintah adalah lembaga yang dibentuk dan secara inheren merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat. Pengawasan internal terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Rencana Stratejik 2017 - 2022, visi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah : **“*Menjadi lembaga yang profesional dan bermartabat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat*”.** Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu: Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan serta mendorong terwujudnya akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Daerah.

* 1. **Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efesien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2022. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan infromasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

* menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
* menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
* menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
* menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
* menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
* menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

* Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015.
* Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

* 1. **Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut:

* Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
* Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
* Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan
* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
* Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
* Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
* Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
* Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
* Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015.
* Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.
  1. **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2022 meliputi hal-hal berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

* 1. Informasi Umum
  2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
  4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

**BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

* 1. Ekonomi Makro
  2. Kebijakan Keuangan
  3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

**BAB IIII IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

* 1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
  2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

**BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

* 1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
  2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

**BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

* 1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
     1. Pendapatan LRA
     2. Belanja
  2. Penjelasan Neraca

5.2.1. Aset

5.2.2. Kewajiban

5.2.3. Ekuitas Dana

* 1. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

5.3.1. Pendapatan LO

5.3.2. Beban

* 1. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
  2. Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas

**BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

**BAB VII PENUTUP**

**BAB II**

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN**

**PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN APBD**

**2.1 Ekonomi Makro**

Pada hakekatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan dan ditetapkan dalam rangka menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, APBD merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam menyejahterakan masyarakat. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu SKPD yang mendapatkan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2022, bertanggung jawab dalam merealisasikan program-program dan kegiatan yang berkontribusi meningkatkan laju perekonomian dan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu yang ingin dicapai dalam tahun 2022 adalah membangun Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah guna mewujudkan *Good Governance* dan terciptanya pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal itu diperlukan agar terlaksana kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan berkeadilan.

Di bidang pengawasan, yang diimplementasikan dalam tahun 2022 guna menggerakan perekonomian masyarakat antara lain adalah:

* Terselenggaranya pengawasan yang efektif dan bermartabat.
* Meningkatnya efesiensi dan efektivitas mekanisme dan prosedur pengawasan.
* Meningkatnya keteraturan yang ditandai oleh kesesuaian kegiatan dengan rencana yang ditetapkan.
* Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Sinergi Instansi Pemerintah.
* Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat secara umum terhadap pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
  1. **Kebijakan Keuangan**

Pada prinsipnya kebijakan di bidang keuangan khususnya pengeluaran mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan. Kebijakan pengeluaran/belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja baik belanja operasi maupun modal melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut:

* Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dalam upaya optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
* Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengalokasian belanja daerah dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat
* Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja daerah.

**2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Penyusunan APBD Tahun 2022, ditempuh dengan pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Pada Tahun 2022 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat melakukan 3 (tiga)Program dengan **12 (dua belas)** kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan, yaitu:

* + - 1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan, antara lain:

| **No** | **Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Indikator** | **Target** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah** | **85%** |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun | 5 Dokumen |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Dokumen DPA Inspektorat yang disusun | 4 Dokumen |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan DPA Inspektorat yang disusun | 2 Dokumen |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan | 8 Dokumen |
| **2** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Tertib Administrasi Keuangan** | **100%** |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya | 110 orang |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan honor | 8 orang |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan | 121 dokumen |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun | 1 dokumen |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan | 13 dokumen |
| **3** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah** | **100%** |
|  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah unit yang dilakukan penjagaan | 8 unit |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumah dokumen laporan barang milik daerah | 2 dokumen |
| **4** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100%** |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 200 stel |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat | 50 orang |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan | 4 kali |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bimtek yang dilaksanaka | 2 kali |
| **5** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Inspektorat yang disediakan | 113 Buah |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 7 unit |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan | 2 unit |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor Inspektorat yang disediakan | 1255 unit |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cetak Amplop   * Cetak Blanko SPPD, Kwitansi, Map SKPD * Penggandaan | 100 kotak  3393 buah  7100 lembar |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | * Langganan Surat Kabar * Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis | 246 eks  6 buah |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi | 25 dokumen |
| **6** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun | 500 surat |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 118728 kwh  1000 mbps  8 rekening  1840 Meter Kubik |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan | Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara | 1 Tahun |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor | Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia | 34 orang |
| **7** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan** | **100%** |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan | 16 unit |
| Pengadaan Mebel | Jumlah mebel yang tersedia | 20 unit |
| **8** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik** | **100%** |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | 1 unit |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | 7 unit |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 89 unit |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab | 12 bulan |

* + - 1. **Program Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Program ini dibagi ke dalam 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan yaitu:

| **No** | **Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Indikator** | **Target** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **Persentase Pengawasan Internal yang Dilaksanakan** | **100%** |
|  | Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah  Laporan Hasil Evaluasi yang diterbitkan  Laporan Hasil Monitoring yang diterbitkan  Laporan Hasil Pemeriksaan  Laporan Hasil reviu | 379 Laporan  104 Laporan  2 Laporan  34 Laporan  112 Laporan |
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah | 117 Laporan |
| Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Kinerja yang direviu | 102 Laporan |
| Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu yang diterbitkan | 52 Laporan |
| Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota | 4 Laporan |
| Kerjasama Pengawasan Internal | Jumlah Hasil pengawasan Internal | 1 Laporan |
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Hasil pengawasan Internal | 70 % |
| **2** | **Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu** | **Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang ditangani** | **100 %** |
|  | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan |
| Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Persentase kasus yang ditangani | 100 % |

* + - 1. **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

| **No** | **Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Indikator** | **Target** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | **Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Bisa di Rumuskannakan** | **100 %** |
|  | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang dirumuskan | 1 PKPT |
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang dirumuskan | 5 peraturan |
| **2** | **Pendampingan dan Asistensi** | **Persentase Asistensi dan Pendampingan yang Dilaksanakan** | **100 %** |
|  | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah yang diterbitkan | 1 Laporan |
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang diterbitkan | 1 Laporan |
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diterbitkan | 3 Laporan |
| Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas | 2 Laporan |

**BAB III**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

* 1. **Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Pada Tahun Anggaran 2022, direncanakan Belanja OPD Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 21.563.708.237,00 untuk membiayai:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 11.774.756.652,00
2. Belanja Modal sebesar,- Rp. 9.413.078.485,00

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **URAIAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** | **%** |
| **B** | **BELANJA** | 21.563.708.237,00 | 21.170.013.197,80 | **98,17** |
| **I** | **BELANJA OPERASI** | 21.187.835.137,00 | 20.798.114.221,80 | **98,16** |
| 1 | Belanja Pegawai | 11.774.756.652,00 | 11.599.580.403,00 | 98,51 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.413.078.485,00 | 9.198.533.818,80 | 97,72 |
| **II** | **BELANJA MODAL** | 375.873.100,00 | 371.898.976,00 | **98,94** |
| 1 | Belanja Tanah | 0,- | 0,- | 0,- |
| 2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 372.873.100,00 | 368.926.150,00 | 98,04 |
| 3 | Belanja Gedung dan Bangunan | 0,- | 0,- | 0,- |
| 4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,- | 0,- | 0,- |
| 5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 3.000.000,00 | 2.972.826,00 | 99,09 |

**Evaluasi terhadap pencapaian akuntabilitas keuangan masing-masing program**

*Evaluasi terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi*

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan guna membantu kelancaran pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Anggaran untuk program ini sebesar Rp15.767.287.256,00 dengan realisasi sebesar Rp15.533.766.833,00 berarti tercapai target sebesar 98,52% Adapun rincian kegiatan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi antara lain:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Program/Kegiatan | Alokasi anggaran | Realisasi  anggaran | Persentase realisasi  (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi** | **15.767.287.256** | **15.533.766.833** | **98,52** |
| 1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 133.688.250 | 131.202.450 | 98,14 |
| 2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 11.821.612.952 | 11.645.538.024 | 98,51 |
| 3 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 58.354.600 | 58.323.600 | 99,95 |
| 4 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 857.079.400 | 854.586.380 | 99,71 |
| 5 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.081.836.433 | 1.056.3866729 | 97,65 |
| 6 | Kegiatan Pengadaan BMD Urusan Pemda | 292.060.700 | 289.348.650 | 99,07 |
| 7 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda | 1.086.472.671 | 1.069.551.096 | 98,44 |
| 8 | Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda | 436.182.250 | 428.829.903 | 98,31 |

Pada umumnya jumlah sisa anggaran tersebut diatas merupakan efisiensi dan penghematan.

*Evaluasi terhadap Program Penyelenggaraan Pengawasan*

Program ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan audit kinerja, reviu dan evaluasi, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP terhadap masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta untuk melakukan kegiatan pengawasan kasus/khusus. Anggaran untuk program ini sebesar Rp4.623.043.609,00 dengan realisasi sebesar Rp4.481.294.436,00 berarti tercapai target sebesar 96,95%. Rincian kegiatan Program Penyelenggaraan Pengawasan antara lain:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Program/Kegiatan | Alokasi anggaran | Realisasi  anggaran | Persentase realisasi  (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Program Penyelenggaraan Pengawasan** | **4.623.043.609** | **4.481.294.436** | **96,95** |
| 1 | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 4.507.023.829 | 4.365.288.736 | 96,87 |
| 2 | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 116.019.780 | 116.005.700 | 99,99 |

Pada umumnya jumlah sisa anggaran tersebut diatas merupakan efisiensi dan penghematan.

*Evaluasi terhadap Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi*

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran APIP dalam Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan serta melakukan Pendampingan dan Asistensi kepada OPD terkait pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah, PMPRB, Saber Pungli dan Penegakan Integritas. Anggaran untuk program ini sebesar Rp1.173.377.372,00 dengan realisasi Rp1.154.951.929,00 berarti target yang dicapai sebesar 98,43%. Rincian kegiatan Program Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Program/Kegiatan | Alokasi anggaran | Realisasi  anggaran | Persentase realisasi  (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Program Perumusan, Kebijakan Pendampingan dan Asistensi** | **1.173.377.372** | **1.154.951.929** | **98,43** |
| 1 | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 481.643.872 | 479.533.300 | 99,56 |
| 2 | Kegiatan Pendampingan dan Asistensi | 691.733.500 | 675.418.629 | 97,64 |

Pada umumnya jumlah sisa anggaran tersebut diatas merupakan efisiensi dan penghematan.

* 1. **Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pencapaian target program dan kegiatan selama tahun 2022 pada prinsipnya tidak dijumpai hambatan/kendala yang berarti. Hal itu terlihat dari tingginya tingkat pencapaian target kinerja keuangan yaitu sebesar 98,16%. jika dilihat capaian target kinerja keuangan per kegiatan, rata-rata persentase capaian realisasi kegiatan diatas 90%.

**BAB IV**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

**4. 1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2022 adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas yang disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan.

* 1. **Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Penerimaan meliputi semua penerimaan dari Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi Uang Muka dari Penerimaan diakui pada saat kas diterima dari Kas Umum Daerah. Akuntansi dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Bendahara Pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dari BUD. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah yang melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disahkan oleh PPK Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

* 1. **Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

**Pengukuran/Penilaian Aset**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan ini adalah:

1. **Kas**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

1. **Piutang**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal yang sesungguhnya berdasarkan bukti-bukti yang belum dapat diterima.

1. **Persediaan disajikan sebesar:**
   * Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
   * Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
2. **Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan

1. **Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahanbaku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

1. **Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

1. **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

1. **Aset Tetap Lainnya**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

1. **Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi**

Penyusutan asset tetap diatur sesuai dengan peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015, penyusutan Aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari asset tetap setiap tahunnya selama masa manfaat. Untuk amortisasi penyusutan aset lainnya berupa Aset tidak berwujud merujuk pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat untuk aset tidak berwujud berupa software ditetapkan selama 5 tahun. Perhitungan metode garis lurus untuk penyusutan aset tetap maupun amortisasi aset tidak berwujud dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Penyusutan per periode = | |  | Nilai yang Dapat Disusutkan |  |
|  |  | Masa Manfaat |  |
|  |  |  |  |  |  |

* 1. **Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (*at cost*). Sesuai dengan Pergub No. 05 Tahun 2015 tanggal 24 Januari 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap, pada tahun 2015 telah dilakukan penyusutan terhadap total Aset Tetap tahun 2013 dan total aset tetap tahun 2015, sedangkan untuk amortisasi dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

**BAB V**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**

**5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **Anggaran 2022** | **Realisasi 2022** | **%** | **Tahun 2021** |
| **1** | **Pendapatan** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak Terpakai | - | - | - | - |

**Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah**

Pada tahun 2022 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki pendapatan.

* + 1. **PENJELASAN POS-POS BELANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **Anggaran 2022** | **Realisasi 2022** | **%** | | **Tahun 2021** |
| **1. Belanja Operasi** | | | **21.187.835.137,00** | **20.798.114.221,80** | **98,16** | **17.463.844.684,-** | | |
|  | | |  |  |  |  | | |
|  | | |  |  |  |  | | |
| **Belanja Pegawai** | | | **11.774.756.652,00** | **11.599.580.403,00** | **98,51** | **10.221.259.355,-** | | |
|  | | |  |  |  |  | | |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2022 dan 2021. Untuk realisasi belanja pegawai tahun 2022 mencapai 98,51% dari anggarannya. Belanja pegawai ini terdiri dari Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto. Sisa belanja pegawai sejumlah Rp175.176.249,00 tidak terealisasi karena efisiensi dan penghematan.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | | **Anggaran 2022** | **Realisasi 2022** | **%** | | **Sisa Anggaran** | |
| **1** | **Belanja Pegawai** | |  |  |  | |  | |
|  | Gaji dan Tunjangan | | 7.036.857.561,00 | 6.939.127.901,00 | 98,61 | | 97.729.660.00 | |
|  | Tambahan Penghasilan ASN | | 4.597.000.000,00 | 4.519.553.502,00 | 98,32 | | 77.446.498.00 | |
|  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | 140.899.091,00 | 140.899.000,00 | 100 | | 0,00 | |
| **Jumlah** | | | **11.774.756.652,00** | **11.599.580.403,00** | **98,51** | | **175.176.158,00** | |
| **No.** | **Perkiraan** | | | **Anggaran 2022** | | **Realisasi 2022** | | **%** | | **Tahun 2021** | |
|  | **Belanja Barang & Jasa** | | | **9.413.078.485,00** | | **9.198.533.818,80** | | **97,72** | | **7.242.585.329,-** | |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 dan 2021, setelah dikurangi pengembalian belanja (*contra post*) Tahun 2022 yaitu Biaya Perjalanan Dinas pada tanggal 06 Desember 2022 sebesar Rp585.000,00.

Untuk realisasi Tahun 2022 mencapai 97,72% dari anggarannya, dengan uraian sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA** | **Anggaran 2022** | **Realisasi 2022** | **%** | **Sisa Anggaran** |
| Belanja Bahan Pakai Habis | 985.099.379,00 | 976.822.764,00 | 99,16 | 8.276.615,00 |
| Belanja Jasa Kantor | 3.012.533.441,00 | 2.983.711.176,80 | 99,04 | 28.822.264,20 |
| Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 56.016.830,00 | 56.008.005,00 | 99,98 | 8.825,00 |
| Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100 | - |
| Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 247.500.000,00 | 247.336.000,00 | 99,93 | 164.000,00 |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin | 192.187.750,00 | 187.195.753,00 | 97,40 | 4.991.997,00 |
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 223.400.000,00 | 221.618.500,00 | 99,20 | 1.781.500,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 4.689.341.085,00 | 4.518.841.620,00 | 96,36 | 170.499.465,00 |
| **Jumlah** | **9.413.078.485,00** | **9.198.533.818,80** | **97,72** | **214.544.666,20** |

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp214.544.666,20 merupakan efisiensi dan penghematan.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **Anggaran 2022** | **Realisasi 2022** | **%** | **Tahun 2021** |
| **2.** | **Belanja Modal** | **375.873.100,00** | **371.898.976,00** | **98,94** | **12.350.000,-** |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2022 dan 2021. Realisasi tahun 2022 mencapai 98,94% dari anggarannya. Sisa belanja modal sebesar Rp3.974.124,00 merupakan evisiensi dan penghematan. Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 hanya berupa Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Liannya, yang terdiri dari:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Objek Belanja LRA** | **Anggaran 2022** | **Realisasi 2022** | **%** | **Sisa Anggaran** |
| **A** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | |
| 1 | Belanja Modal Alat Kantor | 200.105.900,00 | 198.860.000,00 | 99,38 | 1.245.900 |
| 2 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 110.819.900,00 | 109.576.775,00 | 98,88 | 1.243.125 |
| 3 | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat | 6.267.300,00 | 5.709.375,00 | 91,10 | 557.925 |
| 4 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 55.680.000,00 | 54.780.000,00 | 98,38 | 900.000 |
| **B** | **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** | | | | |
| 1 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak | 3.000.000,00 | 2.972.826,00 | 99,09 | 27.174 |
|  | **JUMLAH** | **375.873.100,00** | **371.898.976,00** | **98,94** | **3.974.124** |

Adapun Daftar Belanja Modal Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 21.

**5.2 PENJELASAN POS - POS NERACA**

**5.2.1 ASET**

**ASET LANCAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2022** | **2021** |

1. **Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00 Rp. 0,00**

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021. Sampai dengan 31 Desember 2022, Sisa UYHD sebesar Rp181.881.554,00 telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2022. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun 2022.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 22.064.464.846,80 | 22.064.464.846,80 | 0,00 |

*Penambahan* adalah semua penerimaan SP2D, pemungutan pajak, lain-lain (CP dan UYHD) dengan uraian sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Uraian | Jumlah (Rp) |
| SP2D | 21.352.479.751,80 |
| Potongan Pajak | 711.985.095,00 |
| **Jumlah Penerimaan** | **22.064.464.846,80** |

*Pengurangan* adalah semua pengeluran dari SPJ LS, UP/GU/TU, penyetoran pajak, lain-lain (penyetoran CP dan UYHD) dengan uraian sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Uraian | Jumlah (Rp) |
| SPJ LS, UP/GU/TU | 21.170.013.197,80 |
| Penyetoran Pajak | 711.985.095,00 |
| CP dan UYHD | 182.466.554,00 |
| **Jumlah Pengeluaran** | **22.064.464.846,80** |

Rincian Daftar Realisasi SP2D, SPJ dan Sisa UYHD Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 1 dan SPJ Fungsional per 31 Desember 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2022** | **2021** |

1. **Beban Dibayar Dimuka Rp. 54.891.175,00 Rp 48.550.820,00** Jumlah tersebut merupakan saldo beban bayar dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 yaitu beban jasa dibayar dimuka berupa pembayaran premi asuransi kendaraan dinas dan pembayaran premi asuransi gedung kantor:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jumlah Premi Asuransi Kendaraan Dinas |  | 46.897.975,00 |
| Periode *(26 Desember 2022 s.d 26 Desember 2023)* | |  |
| Beban Tahun 2022 |  | 0,00 |
| **Jumlah Beban Jasa Dibayar Dimuka kendaraan Dinas** |  | **46.897.975,-** |
| Jumlah Premi Asuransi Gedung Kantor |  | 7.993.200,00 |
| Periode *(26 Desember 2022 s/d 26 Desember 2023)* |  |  |
| Beban Tahun 2022 |  | 0,- |
| **Jumlah Beban Jasa Dibayar Dimuka gedung** |  | **7.993.200,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| Premi asuransi kendaraan | 41.573.420,00 | 46.897.975,00 | 41.573.420,00 | 46.897.975,00 |
| Premi asuransi Gedung Kantor | 6.977.400,00 | 7.993.200,00 | 6.977.400,00 | 7.993.200,00 |
| Jumlah | 48.550.820,00 | 54.891.175,00 | 48.550.820,00 | 54.891.175,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2022** | **2021** |

1. **Persediaan Rp 28.943.000,00 Rp 41.297.400,00** Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021, yaitu :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| Bahan Pakai Habis (ATK) | 16.484.900,00 | 61.751.148,00 | 56.842.498,00 | 21.393.550,00 |
| BBM | 24.812.500,00 | 245.919.441,00 | 263.181.941,00 | 7.550.000,00 |
| Jumlah | 41.297.400,00 | 307.670.589,00 | 320.024.439,00 | 28.943.550,00 |

Penambahan Bahan Pakai Habis (ATK) merupakan saldo belanja ATK sesuai realisasi LRA 2022 sebesar Rp61.751.148,00 sedangkan pengurangan merupakan beban pemakaian bahan pakai habis ATK selama tahun 2022 yaitu sebesar sesuai beban pakai habis pada Laporan Operasional (LO) yaitu sebesar Rp56.842.498,00 begitu juga dengan Penambahan BBM merupakan saldo belanja BBM sesuai realisasi LRA 2022 Sebesar Rp245.919.441,00 sedangkan pengurangan BBM merupakan beban BBM pada Laporan Operasional (LO) yaitu sebesar Rp263.181.941,00

Adapun daftar barang persediaan sesuai berita acara stock opname 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2021** |
| - Bahan Pakai Habis/ATK | 21.393.000,00 | 16.484.900,00 |
| * BBM | 7.550.000,00 | 24.812.500,00 |
| **Jumlah** | **28.943.000,00** | **41.297.400,00** |

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16.

**ASET TETAP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2022** | **2021** |

1. **Tanah Rp 1.097.970.000,- Rp 1.097.970.000,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021.

1. Dasar Penilaian

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Neraca Awal Tahun 2005 | Rp. 1.097.970.000 |
| 1. Harga Perolehan 2006 s/d 2022 | Rp. 0 |
| 1. Appraisal 2011 | Rp. 0 |
| 1. Appraisal 2012 | Rp. 0 |
| 1. Appraisal 2013 | Rp. 0 |
| 1. Appraisal 2015 | Rp. 0 |

Daftar Tanah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Rekapitulasi daftar mutasi dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 19.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2022** | **2021** |

1. **Peralatan dan Mesin Rp 5.926.821.897,00 Rp 5.562.445.747,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai peralatan dan mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021.

1. **Dasar Penilaian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Neraca Awal Tahun 2005 | Rp | 113.795.500,00 |
| 1. Harga Perolehan 2006 s/d 2022 | Rp | 5.813.026.397,00 |
| 1. Appraisal 2011 | Rp | 0 |
| 1. Appraisal 2012 | Rp | 0 |
| 1. Appraisal 2013 | Rp | 0 |
| 1. Appraisal 2015 | Rp | 0 |
|  |  |  |

Daftar Peralatan dan Mesin Inspektorat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| Peralatan & Mesin | 5.562.445.747,- | 368.926.150,00 | 4.550.000,00 | 5.926.821.897,00 |
| Akm Peny Peralatan & Mesin | 4.428.262.790,10 | 608.418.017,90 | 0,- | 5.036.680.808,00 |
| Nilai Buku | 1.134.182.956,90 |  |  | 890.141.089,00 |

1. **Mutasi Tambah Kurang**

**Saldo Audited 2021**  5.562.445.747,00

**Mutasi Tambah**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Belanja Modal Tahun 2022 |  | 368.926.150,00 |
| Mutasi antar OPD |  | 0,00 |
| **Total Mutasi Tambah** |  | 0,00 |

**Mutasi Kurang**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reklas ke gedung dan bangunan |  | | | 0,00 |
| Reklas ke asset tidak bermanfaat |  | | | 0,00 |
| Reklas ke asset tidak berwujud |  | | | 0,00 |
| Mutasi antar OPD  Belanja modal tidak dikapitalisir |  | | | 0,00  4.550.000,00 |
| Koreksi Nilai |  | | | 0,00 |
| **Total Mutasi Kurang** |  | | | **4.550.000,00** |
| **Total Mutasi** | |  | **364.376.150,00** | |
| **Saldo per 31 Des 2022** | |  | **5.926.821.897,00** | |

**Penjelasan Mutasi Tambah**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp368.926.150,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 19.

**Penjelasan Mutasi Kurang**

Rekapitulasi belanja modal yang tidak dikapitalisir (nilai perolehan kurang dari Rp1.000.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Barang | Volume | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 1 | Swich Hub | 2 buah | 800.000 | 1.600.000 |
| 2 | Dispenser | 2 buah | 980.000 | 1.960.000 |
| 3 | Dispenser | 1 buah | 990.000 | 990.000 |

Rekapitulasi/ daftar mutasi kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 22.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2022** | **2021** |

1. **Gedung dan Bangunan Rp 3.468.898.543,00 Rp 3.468.898.543,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai gedung dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2021 dan 2022.

1. Dasar Penilaian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Neraca Awal Tahun 2005 | Rp | 1.711.606.650,- |
| 1. Harga Perolehan 2006 s/d 2022 | Rp | 1.757.291.893,- |
| 1. Appraisal 2011 | Rp | 0 |
| 1. Appraisal 2012 | Rp | 0 |
| 1. Appraisal 2013 | Rp | 0 |
| 1. Appraisal 2015 | Rp | 0 |

Daftar Gedung dan Bangunan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Pada Tahun Anggaran 2022 tidak ada mutasi tambah kurang atas Gedung dan Bangunan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2022** | **2021** |

1. **Aset Tetap Lainnya Rp 32.834.154,00 Rp 29.861.328,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai aset tetap lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021.

1. Dasar Penilaian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Neraca Awal Tahun 2005 | Rp | 2,997,800,00 |
| 1. Harga Perolehan 2006 s/d 2022 | Rp | 29.836.354,00 |
| 1. Appraisal 2011 | Rp | 0,00 |
| 1. Appraisal 2012 | Rp | 0,00 |
| 1. Appraisal 2013 | Rp | 0,00 |
| 1. Appraisal 2015 | Rp | 0,00 |

Daftar aset tetap lainnya Inspektorat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat mutasi tambah Aset Tetap Lainnya berupa buku-buku perpustakaan senilai Rp2.972.826,00 dan tidak ada mutasi kurang.

Adapun Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 22.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2022** | **2021** |

1. **Akumulasi Penyusutan Rp 6.455.052.500,77 Rp 5.773.875.250,41**

Akumulasi Penyusutan terdiri dari:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin | 5.036.680.808,00 | 4.428.262.790,10 |
| Akumulasi Penyusutan Gdg dan Bangunan | 1.418.371.692,77 | 1.345.612.460,31 |
|  |  |  |

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akir |
| Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin | 4.428.262.790,10 | 608.418.017,90 | 0,- | 5.036.680.808,00 |
| Akm Peny Gedung dan bangunan | 1.345.612.460,31 | 72.759.232,46 | 0,- | 1.418.371.692,77 |
| Akm. Penyusutan Jln. Irigasi dan jaringan | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Akumulasi asset tetap lainnya | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Total Akm. Penyusutan | 5.773.875.250,41 | 681.177.250,36 | 0,- | 6.455.052.500,77 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Peralatan & Mesin** | **Gedung & Bangunan** |
| SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2021 (NERACA AUDITED) | 4.428.262.790,10 | 1.345.612.460,31 |
| * Jumlah Koreksi Tambah : * Kurang Catat/tdk tercatat * Hibah dr Pihak Ketiga * Mutasi antar OPD * Reklasifikasi * Koreksi + Saldo Awal | 0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00 |
| * Jumlah Koreksi Kurang : * Double Record * Hibah * Penghapusan * Mutasi antar SKPD * Reklasifikasi * Koreksi – Saldo Awal | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| * BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2022 | 608.418.017,90 | 72.759.232,46 |
| * SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2022 | 5.036.680.808,00 | 1.418.371.692,77 |

Penjelasan mutasi tambah:

* Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 Rp. 681.177.250,36.

**ASET LAINNYA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2022** | **2021** |

1. **Aset Tidak Berwujud Rp 232.815.000,- Rp 232.815.000,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tidak berwujud sampai dengan posisi per 31 Desember 2022 dan 2021.

Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 232.815.000,- dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2022. Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang Aset tidak berwujud.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2022** | **2021** |

1. **Akumulasi Amortisasi Rp 213.125.000,00 Rp 171.512.000,00**  Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi amortisasi tersebut:

|  |  |
| --- | --- |
| **Uraian** | **Aset Tidak Berwujud** |
| SALDO AKM AMORTISASI PER 31 DES 2021 (NERACA AUDITED) | 171.512.000,00 |
| * Jumlah Koreksi Tambah : * Kurang Catat/tdk tercatat * Hibah dr Pihak Ketiga * Mutasi antar SKPD * Reklasifikasi * Koreksi + Saldo Awal |  |
| * Jumlah Koreksi Kurang : * Double Record * Hibah * Penghapusan * Mutasi antar SKPD * Reklasifikasi * Koreksi – Saldo Awal |  |
| * BEBAN AMORTISASI TAHUN 2022 | 41.613.000,00 |
| * SALDO AKHIR AKM AMORTISASI PER 31 DES 2022 | 213.125.000,00 |

**Penjelasan mutasi tambah**

* Beban amortisasi aset tidak berwujud tahun 2022 Rp 41.613.000,-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2022** | **2021** |

1. **Aset tidak bermanfaat Rp 463.292.500,- Rp 463.292.500,-**Merupakan saldo aset tidak bermanfaat pada 31 Desember 2022 dan 2021. Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat penambahan nilai aset tidak bermanfaat.

}}

1. **Akumulasi penyusutan Aset tidak Rp 463.292.500,- Rp 463.292.500,-**

**bermanfaat**

Merupakan saldo Akumulasi penyusutan asset tidak bermanfaat pada 31 Desember 2022 dan 2021. Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat penambahan nilai Akumulasi penyusutan aset tidak bermanfaat.

**KEWAJIBAN**

**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2022** | **2021** |

1. **Utang Belanja Rp 17.519.445,00 Rp 18.604.185,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja yang harus dibayar oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat kepada pemberi jasa per 31 Desember 2022 dan 2021. Utang belanja ini terdiri dari:

* *Utang Belanja Barang Dan Jasa* **Rp** **17.519.445,00**

Utang belanja barang dan jasa tersebut merupakan pemakaian bulan Desember 2022 yang dibayarkan bulan Januari 2022, terdiri dari:

Utang belanja telepon sebesar Rp965.208,00,

Utang belanja listrik sebesar Rp15.438.537,00

Utang belanja air sebesar Rp1.115.700,00

Adapun penjelasan mutasi tambah dan kurang utang belanja barang dan jasa Tahun 2022 sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| Utang belanja barang dan jasa | 18.604.185,00 | 17.519.445,00 | 18.604.185,00 | 17.519.445,00 |

*Penambahan* sebesar Rp17.519.445,00 merupakan utang belanja dan jasa berupa utang tagihan telepon, listrik dan air bulan Desember 2022.

*Pengurangan* sebesar Rp18.604.185,00 merupakan utang belanja dan jasa berupa utang tagihan telepon, listrik dan air bulan Desember 2021.

Selengkapnya rincian utang belanja dapat dilihat pada Lampiran 13.

**EKUITAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2022** | **2021** |

1. **Ekuitas Rp 4.157.477.373,23 Rp 4.517.847.402,59**

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Inspektorat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021. Ekuitas ini terdiri dari:

* Ekuitas 4.515.044.229,59
* Surplus/Defisit LO (21.527.580.054,16)
* Surplus/Defisit LRA (21.170.013.197,80)
* Estimasi Perubahan SAL 21.170.013.197,80
* RK/PPKD 21.170.013.197,80

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Estimasi Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara OPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

**5.3 PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

**5.3.1 PENDAPATAN LO**

Selama tahun 2022 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki Pendapatan LO.

**5.3.2 BEBAN**

**1. Beban Operasi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2022** | **2021** |

**Beban Pegawai Rp 11.599.580.403,00 Rp 10.221.259.355,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo beban pegawai 2022 dan 2021. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan - LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO dan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – LO yaitu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uraian** | **2022** | **2021** |
| Beban Gaji dan Tunjangan – LO | 6.939.127.901,00 | 6.306.146.761,00 |
| Beban Tambahan Penghasilan ASN– LO | 4.519.553.502,00 | 3.747.842.594,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO | 140.899.000,00 | 167.270.000,00 |
| **Total** | **11.599.580.403,00** | **10.221.259.355,00** |

Saldo/Jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian beban pegawai selama tahun 2022.

Pada tahun 2022 tidak terdapat perbedaan jumlah belanja pegawai LRA dengan beban pegawai – LO.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA/LO** | **Belanja Pegawai LRA** | **Beban Pegawai LO** | **Selisih +/-** |
| Gaji dan Tunjangan ASN | 6.939.127.901,00 | 6.939.127.901,00 | 0,00 |
| Tambahan Penghasilan ASN | 4.519.553.502,00 | 4.519.553.502,00 | 0,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 140.899.000,00 | 140.899.000,00 |  |
| **Jumlah** | **11.599.580.403,00** | **11.599.580.403,00** | **0,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2022** | **2021** |

**Beban Barang dan Jasa Rp 9.205.209.400,80 Rp 7.246.424.357,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan tahun 2021. Beban Barang dan Jasa – LO 2021 dapat dijeaskan sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **Uraian** | **LO** |
| Beban Bahan Pakai Habis | 989.176.614,00 |
| Beban Jasa Kantor | 2.984.373.263,80 |
| Beban Iuran Jaminan/Asuransi | 49.667.650,00 |
| Beban Sewa Gedung dan Bangunan | 7.000.000,00 |
| Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan, Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 247.336.000,00 |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 187.195.753,00 |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 221.618.500,00 |
| Beban Perjalanan Dinas | 4.518.841.620,00 |
| **Jumlah** | **9.205.209.400,80** |

Adapun perbedaan jumlah Belanja barang dan jasa - LRA dengan Beban barang dan jasa - LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

| **Uraian** | **LO** | **LRA** | **Selisih** |
| --- | --- | --- | --- |
| Beban Bahan Pakai Habis | 989.176.614,00 | 976.822.764,00 | 12.353.850 |
| Beban Jasa Kantor | 2.984.373.263,80 | 2.983.711.176,80 | 662.087,00 |
| Beban Iuran Jaminan/Asuransi | 49.667.650,00 | 56.008.005,00 | (6.340.355) |
| Beban Sewa Gedung dan Bangunan | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan, Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 247.336.000,00 | 247.336.000,00 | 0,00 |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 187.195.753,00 | 187.195.753,00 | 0,00 |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 221.618.500,00 | 221.618.500,00 | 0,00 |
| Beban Perjalanan Dinas | 4.518.841.620,00 | 4.518.841.620,00 | 0,00 |
| Jumlah | 9.205.209.400,80 | 9.198.533.818,80 |  |

Penjelasan selisih:

Penyesuaian persediaan pada semester I dan semester 2 Tahun 2022 berdasarkan berita acara opname persediaan semester 1 dan semester 2 Tahun 2022 yaitu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objek Belanja LRA/LO | Penyesuaian Smtr 1 | | Penyesuaian Smtr 2 | | Jumlah | | |
| Debet | Kredit | Debet | Kredit | | Debet | Kredit |
| * Beban persediaan /Bahan Pakai Habis (ATK) | 703.750 | - |  | 5.612.400 | | 703.750 | 5.612.400 |
| * Beban Persediaan BBM | 16.282.750 | - | 979.750 | - | | 16.282.750 | - |
| Jumlah | 16.986.500 | - | 5.612.400 | 979.750 | | 17.966.250 | 5.612.400 |

1. Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2022 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air, internet bulan Desember yang pembayarannya tidak terakomodir pada anggaran 2022 yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objek Belanja LRA/LO | Penyesuaian Smtr 1 | | Penyesuaian Smtr 2 | | Jumlah | |
| Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| Beban telpon |  | 1,117,823.00 | 965,208.00 |  | 965,208.00 | 1,117,823.00 |
| Beban PDAM |  | 1,220,300.00 | 1,115,700.00 |  | 1,115,700.00 | 1,220,300.00 |
| Beban Listrik |  | 14,519,235.00 | 15,438,537.00 |  | 15,438,537.00 | 14,519,235.00 |
| Jumlah |  | 16,857,358.00 | 17,519,445.00 |  | 17,519,445.00 | 16,857,358.00 |

1. Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objek Belanja LRA/LO | Penyesuaian Smtr 1 | | | Penyesuaian Smtr 2 | | | Jumlah | |
| Debet | Kredit | Debet | | Kredit | Debet | | Kredit |
| Beban Premi asuransi Kendaraan | 41,573,420.00 |  | 41,573,420.00 | | 46,897,975.00 | 41.573.420,00 | | 46,897,975.00 |
| Beban Premi asuransi Gedung | 6,977,400.00 |  | 6,977,400.00 | | 7,993,200.00 | 6.977.400,00 | | 7,993,200.00 |
| Jumlah | **24,275,410.00** |  | **24,275,410.00** | | **54,891,175.00** | **48.550.820,00** | | **54,891,175.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2022** | **2021** |

1. **Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 722.790.250,36 Rp 812.887.701,50**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2022 dan 2021. Beban Penyusutan dan Amortisasi 2022 ini terdiri dari:

* Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 608.418.017,90
* Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 72.759.232,46
* Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp. 41.613.000,00
* Beban penyusutan asset tidak bermanfaat Rp 0,00

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa aset tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada KIB B,C,D daftar inventaris OPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada lampiran 17 dan 18.

Sedangkan Daftar Jurnal Penyesuaian yang dibuat oleh OPD untuk Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 28.

**5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2022** | **2021** |
| **Ekuitas** | **Rp 4.157.477.373,23** | **Rp 4,517,847,402.59** |

Penjelasan atas Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * + - 1. Ekuitas Awal | 4,517,847,402.59 | 4,517,847,402.59 |
| * + - 1. Koreksi Ekuitas | (2,803,173.00) | 0,00 |
| * + - 1. RK PPKD | 21,170,013,197.80 | 0,00 |
| * + - 1. Surplus/Defisit LO | (21,527,580,054.16) | 0,00 |
| **Ekuitas Akhir** | **4,157,477,373.23** | **4,517,847,402.59** |

**Kebijakan /Kesalahan Mendasar**

* Koreksi Persediaan 0,00
* Koreksi nilai saldo awal 0,00
* Koreksi Utang Tahun Lalu 1.746.827,00
* Koreksi Piutang Tahun Lalu 0,00
* Koreksi Kas di Bendahara 0,00

Penerimaan Tahun Lalu

* Koreksi Kas di Bendahara 0,00

Pengeluaran Tahun Lalu

* Mutasi tambah Aset Tetap/Aset Lainnya 0,00
* Mutasi Kurang Aset Tetap/Aset Lainnya (4.550.000,00)
* Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00

**Total Koreksi Ekuitas (Rp 2,803,173.00)**

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 4,517,847,402.59 adalah saldo ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Desember 2021.
2. Surplus/defisit LO sebesar (Rp21,527,580,054.16) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2022.
3. RK PPKD sebesar (Rp 21,170,013,197.80) adalah akun penghubung transaksi OPD dan PPKD tahun 2022 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

* Ekuitas (selisih pengakuan hutang 2021 dengan Pembayarannya di tahun 2022) sebesar Rp. 1.746.827,00
* Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Aset Tetap yang tidak dikapitalisir) sebesar Rp4.550.000,00.

Ekuitas akhir sebesar Rp4,157,477,373.23adalah saldo Ekuitas Inspektorat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022.

* 1. **Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas**

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan akun-akun baru pada neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu:

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional:

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional dengan basis akrual, dapat dijelaskan dalam table berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jenis Pendapatan/Belanja** | **LRA** | **LO** | **Selisih** |
| **Belanja / beban** | 21.170.013.197,80 | 21.527.580.054,16 | 365,089,682.36 |
| - Belanja / beban Pegawai | 11,599,580,403.00 | 11,599,580,403.00 | - |
| - Belanja / beban Barang dan Jasa | 9,198,533,818.80 | 9,205,209,400.80 | 6,675,582.00 |
| * Belanja Modal | 371,898,976.00 | - | (364,376,150) |
| - Beban Penyusutan dan Amortisasi | - | 722,790,250.36 | 722,790,250.36 |
| * Beban penyisihan Piutang |  |  | - |
| **Jumlah Belanja / beban** | 21.170.013.197,80 | 21.527.580.054,16 | 365,089,682.36 |

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada lampiran 27.

**BAB VI**

**PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

* 1. **Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelengg`araan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi yaitu;

* + - 1. Perencanaan Program Pengawasan
      2. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan
      3. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektorat Provinsi mempunyai kewenangan sebagai berikut ;

1. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah
2. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu
3. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja
4. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme
5. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa
   1. **Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat Provinsi terdiri dari:

* + 1. Inspektur
    2. Sekretariat, terdiri dari :
       1. Sub Bagian Perencanaan
       2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
       3. Sub Bagian Administrasi dan Umum
    3. Inspektur Pembantu I
    4. Inspektur Pembantu II
    5. Inspektur Pembantu III
    6. Inspektur Pembantu IV
    7. Inspektur Pembantu V
    8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga:

1. Fungsional Auditor yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan jenjang jabatannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

Kelompok jabatan fungsional tugasnya melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.

Pejabat fungsional Auditor maupun P2UPD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standar pengawasan dan kode etik yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Propinsi melalui Inspektur Pembantu terkait.

* 1. **Sumber Daya Aparatur Pengawasan**

Keadaan Pegawai/Jumlah personil Inspektorat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 97 orang yang dapat dilihat dalam komposisi sebagai berikut:

* + 1. Berdasarkan Golongan/Ruang :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Golongan** | **GOL** | **JUMLAH** |
|  | Pembina Utama | IV/e | 0 |
|  | Pembina Utama Madya | IV/d | 1 |
|  | Pembina Utama Muda | IV/c | 4 |
|  | Pembina Tingkat I | IV/b | 8 |
|  | Pembina | IV/a | 14 |
|  | Penata Tingkat I | III/d | 18 |
|  | Penata | III/c | 17 |
|  | Penata Muda Tingkat I | III/b | 12 |
|  | Penata Muda | III/a | 12 |
|  | Pengatur Tingkat I | II/d | 7 |
|  | Pengatur | II/c | 5 |
|  | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | - |
|  | Pengatur Muda | II/a | - |
|  | Juru | I/c | - |
|  | Jumlah |  | 98 |

* + 1. Berdasarkan Jabatan**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN** | **ESELON** | **JUMLAH** |
|  | Inspektur | II | 1 |
|  | Sekretaris | III | 1 |
|  | Inspektur Pembantu | III | 5 |
|  | Kepala Sub Bagian | IV | 1 |
|  | P2UPD | Fungsional tertentu | 25 |
|  | Auditor | Fungsional tertentu | 31 |
|  | Fungsional Perencana | Fungsional tertentu | 1 |
|  | Fungsional Umum | Non Eselon | 33 |
|  | ***Jumlah seluruhnya*** |  | 98 |

* + 1. Berdasarkan Jenis Kelamin :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS KELAMIN** | **JUMLAH** |
|  | Laki-Laki | 57 |
|  | Perempuan | 41 |
|  | ***Jumlah seluruhnya*** | **98** |

* + 1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **TINGKAT PENDIDIKAN** | **JUMLAH** |
|  | Pasca Sarjana (S2) | 25 |
|  | Sarjana (Strata 1) | 57 |
|  | Diploma III | 5 |
|  | SLTA | 11 |
|  | SLTP | - |
|  | SD | - |
|  | ***Jumlah seluruhnya*** | **98** |

* 1. **Strategi**

Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan stratejik, meliputi penetapan program operasional dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Pemilihan strategi yang tepat dapat memberikan arah dan dorongan serta kesamaan pandangan bagi segenap jajaran Inspektorat Provinsi dalam mencapai visi dan misi. Adapun strategi yang dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan.
2. Mendorong upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang profesional melalui diklat, bimtek, sosialisasi untuk peningkatan kualitas pengawasan.
3. Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap SKPD.
4. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
   1. **Kebijakan**

Untuk menetapkan program dan kegiatan diperlukan adanya kebijakan organisasi yang merupakan pedoman pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dipatuhi agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi Inspektorat Provinsi .

Kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan arahan, batasan dan petunjuk bagi seluruh jajaran Inspektorat Daerah Provinsi serta memberikan acuan prioritas sumber daya yang harus digunakan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam penetapan strategi, kebijakan dimaksud digunakan sebagai pedoman dan acuan anggota organisasi dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan merupakan pedoman yang diperlukan untuk menentukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai misi dan visi.

* 1. **Program**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Terkait dengan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi, maka dalam tahun 2021 telah dilaksanakan 2 program dengan total 4 (empat) kegiatan, masing-masing program sebagai berikut :

* + 1. **Program Program Penyelenggaraan Pengawasan** yang diaplikasikan kedalam 2 (dua) kegiatan pokok dan 9 (sembilan) sub kegiatan yaitu:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Penyelenggaraan Pengawasan Internal |
|  | 1. Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah |
| 1. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah |
| 1. Reviu Laporan Kinerja |
| 1. Reviu Laporan Keuangan |
| 1. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota |
| 1. Kerjasama Pengawasan Internal |
| 1. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |
| 2. | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu |
|  | 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah |
| 1. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu |

* + 1. **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi** yang diaplikasikan kedalam 2 (dua) kegiatan pokok dan 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan |
|  | 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan |
| 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan |
| 2. | Pendampingan dan Asistensi |
|  | 1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah |
| 1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi |
| 1. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |
| 1. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas |

**BAB VII**

**PENUTUP**

**7.1 KESIMPULAN**

Pada tahun 2022 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dan melaksanakan 3 (tiga)Program dengan12 (dua belas)kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan dengan pencapaian target telah ditetapkan. Pada tahun 2022 pencapaian target Realiasi Anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Barat mencapai 98,17%. Kekurangannya secara umum disebabkan karena adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

* 1. Dalam Tahun Anggaran 2022, total anggaran belanja daerah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp21.563.708.237,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp21.187.835.137,00 dan Belanja Modal sebesar Rp375.873.100,00. Total realisasi belanja adalah sebesar Rp21.170.013.197,80 (98,17%) yang terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp20.798.114.221,80 (98,16%) dan Belanja Modal sebesar Rp371.898.976,00 (928,94%) dari jumlah anggaran.
  2. Kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 (Nihil), karena telah disetorkan ke kas Daerah. Beban Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2022 sebesar Rp54,891,175.00 merupakan premi asuransi kendaraan dinas dan premi asuransi gedung kantor yang belum jatuh tempo. Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.943.550,00 terdiri dari Alat Tulis Kantor dan BBM. Kewajiban jangka pendek terdiri dari Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp17,519,445.00
  3. Selama Tahun 2022, aset tetap yang mengalami penambahan adalah Peralatan dan Mesin dan aset tetap lainnya.

**7.2 SARAN**

* + - 1. Perlu ditingkatkannya Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntansi pada Penyusun Laporan Keuangan.
      2. Perlu penambahan Jumlah auditor, P2UPD dan staf fungsional umum di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
      3. Perlunya sinergitas antara PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam menyiapkan administrasi belanja terutama pada Belanja Modal.

Demikian Catatan atas laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

Padang, 31 Desember 2022

**Plh. INSPEKTUR**

**DEVI KURNIA, S.H, M.M**

Pembina Utama Madya

NIP. 1964 0707 199108 1 001